EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGERING KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN

EVALUATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN NGERING VILLAGE, JOGONALAN DISTRICT, KLATEN REGENCY

Oleh: Kesumarienatsya Eljo Permata Ayu dan Argo Pambudi, M. Si, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,
kesumarienatsyapemataayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa maupun mengetahui kendala dalam proses pengelolaan di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan metode evaluasi keputusan teoritis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan lima indikator yang ada yaitu efektifitas, efisiensi, perataan, responsifitas dan ketepatan sedangkan dalam indikator kecukupan, pengelolaan Dana Desa dinilai pencapaian hasil yang belum maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa telah dijumpai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala tersebut berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal Pemerintah Desa Ngering selaku penyelenggara pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Evaluasi, Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa.

Abstrack

The purpose of this study is to evaluate the management of the Village Fund and determine the inhibiting of management process in Ngering Village, Jogonalan District, Klaten Regency. The research design in this study used evaluation research with a theoretical decision evaluation approach using primary data and secondary data. Data collection techniques were taken by interviews, observation, and documentation. The data validity technique was source triangulation. Data analysis techniques were carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results showed that the management of the Village Fund in Ngering Village, Jogonalan District, Klaten Regency was in accordance within five existing indicators, namely effectiveness, efficiency, leveling, responsiveness and accuracy, while in the indicator of adequacy, the Village Fund management was assessed to have not reached maximum results. The obstacles faced by the village government in the management of the Village Fund have been found in the planning, implementation and accountability stages. These inhibiting factors were from internal and external parties Ngering Village Government as the organizer of the Village Fund management.

Keywords: Evaluation, Village Fund, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap pentingnya keberhasilan pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan perkembangan di wilayah pedesaan saat ini telah sejalan dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Tujuan adanya strategi membangun Indonesia dari pinggiran tersebut yaitu untuk memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan di pedesaan direalisasikan melalui agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita poin ke-3 yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Buku Pintar Dana Desa, 2017: 24).

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan desa, memperkuat kedudukan dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa, terealisasi dengan adanya kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya Undang-Undang tentang Desa telah menciptakan era baru dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan kewenangan luas kepada desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Penyerahan kewenangan terhadap desa ini didukung dengan pemberian dana bantuan yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, dimana terdapat *gap* yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS (September, 2015) memaparkan data tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 14,09%. Maka dalam menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan nasional tersebut pemerintah pusat mengambil langkah dengan mengalokasikan dana bagi desa yang disebut dengan Dana Desa. Pengalokasian dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasian dana anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setiap tahunnya pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata tiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata tiap desa sebesar Rp. 628 juta dan pada tahun 2017 Dana Desa mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata penerimaan tiap desa sebesar Rp. 800 juta (Kemenkeu, 2018). Dana yang dialokasikan untuk pemerintah desa ini tidaklah sedikit, sehingga dana ini tidak terlepas dari masalah

krusial dalam proses pengelolaannya, maka perlu adanya pengawasan pengelolaan Dana Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Kecamatan Jogonalan menjadi salah satu kecamatan penyumbang desa tertinggal di Kabupaten Klaten, salah satunya adalah Desa Ngering. Berdasarkan Data Status Perkembangan Desa ditinjau dari Desa Membangun (IDM), Desa Ngering pada tahun 2016 masih dinyatakan sebagai desa tertinggal, maka pemerintah desa berkomitmen untuk menjadikan desa yang mandiri dengan memanfaatkan secara penuh anggaran Dana Desa yang diterima. Berikut tabel penerimaan Dana Desa di Desa Ngering;

Tabel 1. Penerimaan Anggaran Dana Desa di Desa Ngering Tahun Anggaran 2016 – 2018

REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018
614.155.000	783.262.000	761.896.000

(Sumber: Data Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Ngering Tahun Anggaran 2016-2018)

Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengelola desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan membuka lapangan pekerjaan dan memfasilitasi sarana prasarana sehingga nantinya berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya tujuan pengelolaan Dana Desa tersebut, maka diharapkan prioritas penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Namun dalam pengelolaannya ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu adanya ketimpangan penyerapan anggaran penggunaan Dana Desa di Desa Ngering antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat, ketidaksiapan kemampuan yang dimiliki perangkat desa dalam penggunaan perangkat elektronik dan pengaksesan sistem pelaporan keuangan desa sehingga muncul kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Ngering, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemaparan latar belakang tersebut dan pemaparan dari hasil wawancara awal.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

William N. Dunn (2003: 608) mengartikan bahwa Evaluasi Kebijakan berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini Karen hasil tersebut memberik sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah kebijakan telah teratasi, sehingga dalam melakukan pengevaluasian dibutuhkan suatu pengukuran keberhasilan kebijakan. Dunn (2003: 610) juga menjelaskan 6 indikator dalam pengevaluasian kebijakan yakni kriteria efektifitas, kriteria efisiensi, kriteria kecukupan, kriteria perataan, kriteria

responsivitas, dan kriteria ketepatan. Maka dari itu, untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten peneliti menggunakan keenam kriteria evaluasi dari Dunn untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengetahui kendala dalam pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian evaluasi dengan metode evaluasi keputusan teoritis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 1 Februari 2019 hingga 1 April 2019 di Kantor Pemerintah Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Bapak N. Rachmanto, Kepala Desa Ngering; Bapak Untung Sudiyono, Sekretaris Desa Ngering; Bapak Y. Aris Winanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngering; Saudara Muh. Arif Ikhsanudin, S.Pd, Pendamping Desa; Saudara Veri Spto Nugroho, Pendamping Desa Ngering; maupun Saudara Yosef Adhi dan Saudari Berta Lani S, Masyarakat Perwakilan Desa Ngering.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permen Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, RPJM Desa 2013 – 2019, Laporan Realisasi APBD Ngering Tahun Anggaran 2016 – 2018, dan Rincian Realisasi APBD Ngering Tahun Anggaran 2016 – 2018.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Jonathan Sarwono (2006: 224) yaitu, kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Data ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pengamatan berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering.

Pada penelitian ini peneliti hanya menjalankan satu fungsi yaitu menjadi seorang pengamat saja yang artinya dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi atau pengamatan melalui cara tidak berperan serta. Metode ini digunakan dalam rangka mencari data mengenai pengelolaan Dana Desa yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

2. Wawancara

Berdasarkan Esterberg (dalam Sugiyono, 2008: 231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam ini menggunakan teknik wawancara semi struktur yang merupakan teknik wawancara dengan menggunakan panduan dan pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.

Tujuan dari penggunaan wawancara semi struktur yaitu untuk menciptakan adanya percakapan yang interaktif antara pewawancara dengan narasumber dan berusaha untuk memperoleh data yang jelas dan terpercaya seputar penelitian yang dikaji.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2014) dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sehingga dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumentasi sebagai metode pengumpulan data agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya dengan didukung data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2013-2019, Laporan Realisasi APBD Ngering Tahun Anggaran 2016 – 2018, dan Rincian Realisasi APBD Ngering Tahun Anggaran 2016 – 2018.

Teknik Analisis Data

Miles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2008: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan model yang dikemukakan Miles dan Hubberman (1984) yaitu meliputi aktivitas reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Ngering menjadi salah satu desa tertinggal yang berada di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, merupakan desa dengan sebagian besar wilayahnya adalah lahan persawahan yang subur dan sepanjang tahun dapat ditanami tanaman berupa padi, palawija, sayuran maupun tembakau. Sebagai salah satu desa yang

tertinggal, Desa Ngering terus berupaya lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan mengelola berbagai sumber daya potensial yang dimiliki, termasuk didalamnya mengelola secara efisien keuangan dan kekayaan milik desa. Penerimaan APBDes Ngering terus mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya penerimaan dana transfer bagi desa.

Pendapatan Desa Ngering berdasarkan Undang-Undang tentang Desa pasal 72, terdiri atas Pendapatan Asli Desa termasuk didalamnya hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; dan Pendapatan Transfer yang berupa Alokasi Dana Desa; Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Menjadi salah satu pendapatan di Desa Ngering, pemberian Dana Desa diberikan dalam nominal yang besar. Adapun pendapatan Desa Ngering dari Dana Desa yang diperoleh tiap tahun sebagai berikut:

Tabel 2. Besaran Dana Desa yang diterima
Desa Ngering Tahun 2016 – 2018

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	1.456.025.258	1.143.280.995
2017	1.295.512.277	1.648.394.182
2018	1.881.600.000	1.826.784.836

(Sumber: Perubahan APBN, Sumber Dana: Dana Desa, diolah oleh Peneliti, 2019)

Pada tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan Desa Ngering yang bersumber dari Dana Desa, pada tahun 2016 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 614.155.000. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, perolehan Dana Desa menjadi sebesar Rp. 783.262.000 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga Dana Desa yang diterima menjadi sebesar Rp. 761.896.000. Peningkatan penerimaan Dana Desa didasari atas kemampuan pengelolaan keuangan Desa Ngering telah meningkat untuk melakukan program pembangunan dan pemberdayaan.

Berdasarkan jejaring aspirasi masyarakat dalam musrenbangdes dengan menimbang skala prioritas, adil, merata, partisipatif dan ekonomis, maka arah kebijakan pembangunan Desa Ngering pada RPJM Desa Ngering tahun 2013-2019 akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: peningkatan sarana dan prasarana; peningkatan kesehatan; peningkatan pendapatan petani; peningkatan peran pemuda dan olahraga; peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat; penanggulangan masalah pengangguran; kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi; peningkatan PAD; dan peningkatan pendidikan. Arah kebijakan pembangunan tersebut bertujuan untuk mengembangkan Desa Ngering

menjadi desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya program dan kegiatan yang harus dicapai, maka pengelolaan keuangan desa harus semakin baik.

Sejak dikucurkannya Dana Desa pada tahun 2015, Pemerintah Desa terus mengupayakan perkembangan-perkembangan di desa dan terus berkomitmen merealisasikan program dan/atau kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kendala dan permasalahan pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering. Meskipun masih mengalami kendala, Dana Desa telah memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat Desa Ngering terutama di bidang pembangunan. Manfaat yang dirasakan yaitu semakin memadainya infrastruktur dan sarana prasarana desa, sehingga hal ini berdampak pula pengembangan ekonomi lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering dilihat dari enam kriteria, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsifitas, perataan dan ketepatan (Dunn,2003:610). Maka untuk mengetahui pencapaian kriteria tersebut maka evaluasi pengelolaan Dana Desa tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Efektifitas

Tolok ukur efektifitas dari pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 – 2018 di Desa Ngering yaitu tercapainya target-target yang telah direncanakan bersama oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara kebijakan, dibantu oleh BPD serta melibatkan masyarakat desa sebagai penyumbang aspirasi. Tujuan dari adanya pengelolaan Dana Desa di Desa

Ngering yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan ini dicapai melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering digunakan untuk mendanai program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada hasil penelitian bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 – 2017 masih diprioritaskan penggunaannya pada pembangunan infrastruktur desa meliputi pembenahan jalan poros desa, pembangunan talud-talud desa dan pembangunan kios kuliner desa. Penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat baru dimulai pada tahun 2018 namun penyerapan dananya tidak lebih besar dari penyerapan dana untuk pembangunan infrastrukturnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Ngering masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Perencanaan menjadi faktor kunci dalam pencapaian kesuksesan akhir kebijakan. Dalam penyusunan perencanaan pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Ngering bersama BPD mengadakan serangkaian penjangkauan aspirasi dimulai dari musdus ditingkat dusun dan musrenbangdes ditingkat desa. Selain musdus dan musrenbangdes, BPD juga melakukan penjangkauan aspirasi melalui kegiatan *hearing*, hal ini dilakukan untuk menjaring seluruh aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran.

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari pembangunan dan

pelelangan kios kuliner desa pada tahun 2017 membawa dampak pada peningkatan pendapatan pedagang kios yang merupakan masyarakat Desa Ngering. Pembangunan kios kuliner yang berdampingan dengan pembangunan taman buah desa memberikan dampak positif tersendiri bagi desa. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, keberhasilan lainnya yaitu pemerintah Desa Ngering dijadikan acuan oleh desa lain dalam kegiatan replika pengelolaan Dana Desa dengan meninjau wisata edukatif agro wisata taman buah desanya.

Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering yang efektif adalah pengelolaan melalui pemenuhan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil penjangkauan aspirasi dari masyarakat desa Desa Ngering.

2. Kriteria Efisiensi

Tolok ukur efisiensi dari pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 – 2018 di Desa Ngering yaitu anggaran dalam pembangunan di Desa Ngering merupakan hal penting, tanpa anggaran yang memadai pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal. Bagi pemerintahan desa untuk memulai pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat pasti memerlukan banyak dana. Apabila dilihat dari pencapaian hasil yang telah dirasakan maka pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan telah efektif dengan mempertimbangkan lama waktu pembangunannya. Penggunaan Dana Desa di Desa Ngering dirasa bahwa telah efisien hal ini dinilai dengan mempertimbangkan anggaran yang diterima setiap tahun telah

terserap guna untuk mendanai pembangunan dengan kata lain tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

Desa Ngering menyerap dana yang dialokasikan untuk perealisasi prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dimana hasil pembangunan yang telah terealisasi yaitu pembangunan taman buah desa, pengaspalan jalan, pembangunan thalud, pengadaan kios kuliner, pengadaan lahan parkir, pembangunan gudang, dan pengadaan gazebo.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menggunakan Dana Desa yang terbatas namun terus dikelola dengan baik menghasilkan *output* yang maksimal, hal ini terlihat dari ketercapaian tujuan dari pembangunan yang sudah dilakukan meliputi terdapat *landmark* sebagai ikon baru dari Desa Ngering, ketersediaan agrowisata baru desa, tersedianya sarana prasarana bagi masyarakat meliputi sarana bermain; sarana rekreasi anak; prasarana kios kuliner; prasarana saluran irigasi air yang memadai, kemudahan mobilitas pengangkutan hasil panen masyarakat, ketersediaan ruang terbuka hijau dan tempat komunikasi sosial bagi masyarakat, penambah peluang pemasukan bagi; desa; masyarakat desa; maupun karang taruna.

Pada pencapaian prioritas program dan/atau kegiatan pengaturan waktu pengerjaan juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah desa. Hal ini mengingat pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat berlandaskan pada perhitungan dari RAPBDes yang sebelumnya telah ditentukan, dapat dikatakan bahwa total pengalokasian Dana

Desa tidak dikurangi maupun tidak ada penambahan dana bagi desa. Oleh karena itu penggunaan Dana Desa harus dilakukan waktu seperti yang telah direncanakan untuk menghindari adanya tambahan-tambahan dana yang dibebankan kedepannya. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering terlihat dari pemerintah Desa Ngering terus berupaya untuk merealisasikan prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan standart waktu yang telah ditentukan dalam pengerjaannya.

3. Kriteria Kecukupan

Dalam kriteria kecukupan, pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering berkaitan tentang sejauhmana pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa belum dapat dikatakan memenuhi kriteria kecukupan, hal ini dikarenakan oleh belum terpecahkannya masalah pengangguran di usia produktif. Pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi pemuda dengan memberikan kesempatan untuk mengelola lahan parkir dari taman buah, Namun pada kenyataannya, pendapatan dari mengelola lahan parkir digunakan untuk menambah pendapatan kas organisasi pemuda bukan digunakan untuk pendapatan perorangan.

4. Kriteria Perataan

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Ngering berupaya untuk memberikan program dan kegiatan tanpa adanya perbedaan sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi bagian yang turut memajukan desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Ngering. Berdasarkan hasil penelitian, seperti yang diketahui bahwa Dana Desa digunakan dalam melakukan pembangunan desa di

bidang infrastruktur maupun kemasyarakatan dengan menysasar pada sasaran-sasaran pembangunan yang tepat. Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya ditentukan dari usulan-usulan masyarakat pada saat musrenbangdes dan dibagikan kepada setiap RW yang digunakan untuk pembangunan infratruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penilaian lain yang termasuk dalam indikator perataan yaitu, mengenai kewenangan pembangunan yang sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Desa Ngering berdasarkan hasil usulan dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat Desa Ngering sendiri. Pembangunan dapat dilakukan bersama dengan pihak ketiga atau pihak diluar pemerintah desa maupun masyarakat disaat proyek pembangunan skala besar harus mendatangkan alat-alat khusus dalam pengerjaannya.

Tentunya apabila tidak ada koordinasi yang baik antar pemerintah Desa Ngering dengan masyarakat maupun lembaga desa terkait yang berwenang terhadap proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering, maka tidak akan bisa mewujudkan ketercapaian tujuan yang telah diharapkan dari adanya Kebijakan Dana Desa di Desa Ngering.

5. Kriteria Responsivitas

Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering pada tahun 2016 – 2018 diharap mampu merespon kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Sejalan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa maka dalam pengelolaannya Dana Desa di Desa Ngering digunakan untuk memenuhi kebutuhan di bidang infrastuktur dan pemberdayaan masyarakatnya. Terlebih pula, dengan

adanya *Master Plan* Pembangunan Desa Ngering, masyarakat dimudahkan untuk mengetahui hasil proses pembangunan desa telah terealisasi. Pembangunan Desa jadi lebih mudah diawasi oleh masyarakat secara umum dengan melihat *master plan* yang terpasang.

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa di Desa Ngering memang sudah berjalan dengan baik, terlihat bahwa masyarakat desa merasakan dampak yang positif setiap tahunnya yaitu memberikan kemajuan yang menguntungkan masyarakat desa sendiri. Masyarakat sangat senang dengan adanya pembangunan tersebut, terutama para warga yang belum memiliki pekerjaan sebelumnya. Harapandengan adanya pembangunan yang terus diupayakan oleh pemerintah desa tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Ngering.

Selain itu pembangunan *Master Plan* tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata unggulan bukan hanya di Desa Ngering namun juga di Kecamatan Jogonolan sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa dan juga dapat dinyatakan sebagai ikonik baru dari Kecamatan Jogonolan maupun juga sebagai destinasi wisata baru. Masyarakat juga dapat membuka peluang usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

6. Kriteria Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai, berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar

berguna atau bernilai. Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Ngering dan setiap pembangunan infrastruktur dapat berguna bagi masyarakat. Sasaran kebijakan merupakan pihak yang menjadi target keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kebijakan pembangunan desa ialah masyarakat Desa Ngering. Pembangunan desa yang menitikberatkan masyarakat sebagai sasaran utama. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan desa diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dan pula mendongkrak penerimaan pendapatan asli desa.

Kendala Pemerintah Desa Ngering dalam Pengelolaan Dana Desa

Kendala yang dialami dapat berasal dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia. Berikut kendala dalam tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa yaitu tahap perencanaan; pengalokasian Dana Desa di Desa Ngering masih diarahkan pada pembangunan fisik dibanding dengan program pemberdayaan, ketersediaan potensi desa yang dimiliki Desa Ngering, melihat kondisi desa yang sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif dan jauh dari perkotaan membuat pemerintah desa kesulitan mencari potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan, kesulitan menentukan skala perhitungan kerugian dan keuntungan, dan pergantian harga barang dan jasa dalam satu tahun pengerjaan.

Tahap penganggaran; Prioritas penggunaan yang masih lebih banyak digunakan untuk mendanai pembangunan

infrastruktur ini menjadi masalah pula dalam pengelolaan Dana Desa, dan lambatnya pencairan dana, serta pelaksanaan pengerjaan yang bergantung pada cuaca. Tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban terkhusus kendala dihadapi pada proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) yang harus dilakukan secara online. Kendala dalam pengelolaan Dana Desa sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kemampuan SDM aparatur desa yang tidak memadai dalam pengaksesan teknologi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, ditinjau dari enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu pertama, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering sudah berjalan efektif dimana hal ini terlihat dari telah terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi dari masyarakat Desa Ngering.

Kedua, kebijakan Dana Desa dinilai telah efisien dalam pengelolaannya dengan melihat bahwa pemerintah desa terus berupaya untuk merealisasikan prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan standart waktu yang telah ditentukan dan berupaya menghasilkan *output* yang maksimal bagi masyarakat desa.

Ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria kecukupan terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering belum dapat memenuhi kecukupan dalam

memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terkhusus masalah yang dihadapi oleh para pemuda yaitu kurangnya lapangan pekerjaan bagi pemuda desa.

Keempat, pengelolaan Dana Desa telah didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari difasilitasinya 13 RW dengan diberikan Dana Desa sebesar 10.000.000,00 untuk melakukan pembangunan dan pemenuhan dari kebutuhan masyarakat RW masing-masing.

Kelima, pengelolaan Dana Desa sudah ternilai responsif terlihat dari pembagian infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa di Desa Ngering memang sudah berjalan dengan baik, terlihat bahwa masyarakat desa merasakan dampak yang positif setiap tahunnya yaitu memberikan kemajuan yang menguntungkan masyarakat desa sendiri.

Keenam, pengelolaan Dana Desa di Desa Ngering dapat dinyatakan telah tepat sasaran. Hal ini terlihat dari sasaran kebijakan pembangunan desa ialah masyarakat Desa Ngering.

Berdasarkan pengevaluasian pengelolaan Dana Desa tersebut, maka kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu, tahap perencanaan; kebutuhan masyarakat masih sebatas menginginkan kegiatan pembangunan saja, ketersediaan potensi desa yang dimiliki Desa Ngering sehingga pemerintah desa kesulitan mencari potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan, menentukan skala perhitungan kerugian dan keuntungan, pergantian harga barang dan jasa dalam satu tahun pengerjaan, Keterbatasan kemampuan mengoperasikan perangkat komputer dan mengoperasikan sistem penyusunan penganggaran

menjadikan penyusunan administrasi desa. Pada tahap pelaksanaan dihadapkan pada kendala lambatnya pencairan dana dan pelaksanaan pengerjaan yang bergantung pada cuaca. Tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban yang menjumpai kendala pada pengadministrasian terkhusus pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan sistem keuangan desa (siskeudes).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Ngering lebih bisa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes agar program dan/atau kegiatan pembangunan desa dapat lebih sejalan dengan himbauan dari pemerintah pusat.
2. Seharusnya Pemerintah Desa Ngering mengajak masyarakat maupun lembaga yang ada di desa untuk menyadari potensi-potensi yang dimiliki sehingga potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi Desa Ngering sendiri.
3. Perlunya pengadaan pelatihan bagi pegawai yang belum menguasai teknologi yang berkesinambungan agar mampu mengoperasikan teknologi dan komunikasi sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan menjadi efektif dan efisien lagi.
4. Sebaiknya Pendamping Desa mengadakan pelatihan perhitungan skala kerugian dan keuntungan, agar dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di tahun berikutnya dapat terlaksanakan dengan cepat dan tepat sehingga dana yang diterima sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan desa.

5. Partisipasi masyarakat dalam pengusulan aspirasi juga harus lebih ditingkatkan agar dalam rapat musrenbangdes Pemerintah Desa Ngering dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 – 2018 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BPS.go.id. *Data Tingkat Kemiskinan Periode September 2015*. Diakses 9 Januari 2019 pukul 01.22 WIB pada laman: <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DirJend Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: DirJen Perimbangan Keuangan

Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, University Press.

Kementerian Keuangan DiJend Perimbangan Keuangan. *Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018*. Diakses 24 November 2018 pukul 23:14 WIB pada laman: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>

Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.